



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah diperlukan penambahan kegiatan baru dalam Renstra Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, diperlukan penyesuaian pembagian kewenangan urusan dan nomenklatur Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022, Nomor 84) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Lampiran Bab IV Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra masing-masing PD diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

2. Lampiran Bab VI Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021-2026 pada Renstra masing-masing PD diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Semua ketentuan mengenai PD yang mengalami perubahan nomenklatur sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai PD sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.

Pembina/ IV (a)

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 57
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGA
TAHUN 2024

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PADA
RENSTRA OPD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN NOMOR 57 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2024

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
TAHUN 2021-2026 PADA RENSTRA OPD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Lampiran 1: Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

OPD: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR	FORMULASI
					TAHUN-1 (2022)	TAHUN-2 (2023)	TAHUN-3 (2024)	TAHUN-4 (2025)	TAHUN-5 (2026)		
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,18	76,48	76,78	77,08	77,38	77,68	77,68	IKM tahun N (data dari bagian organisasi)
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,50	84,50	85,50	85,60	85,70	85,80	85,80	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)
2. Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55	(Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1 dikali 100
	2.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	27,51	nilai ekspor pada tahun N
3. Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi		Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	persen	N/A	3,99	3,84	3,69	3,56	3,44	19,94	(Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1) / Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 * 100
	3.1. Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	9,02	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi s.d Tahun N (akumulasi Tahun N-1 ditambah Tahun N)

Lampiran 2: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

OPD: Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,18	76,48		76,78		77,08		77,38		77,68		77,68	IKM tahun N (data dari bagian organisasi)
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,50	84,50		85,50		85,60		85,70		85,80		85,80	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100 Rp 7.600.562.000		100 Rp 7.586.472.000		100 Rp 7.069.976.000		100 Rp 7.014.252.000		100 Rp 7.979.431.000		100 Rp 37.250.693.000	Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100 Rp 22.850.000		100 Rp 22.850.000		100 Rp 15.663.000		100 Rp 18.084.000		100 Rp 22.850.000		100 Rp 102.297.000	Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + Persentase capaian sub keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD + Persentase capaian sub keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 2.750.000		Rp 2.750.000		Rp 2.146.000		Rp 3.132.000		Rp 2.750.000		Rp 13.528.000	
				Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	2	2 Rp 2.750.000		2 Rp 2.750.000		0 Rp 0		0 Rp 0		0 Rp 0		0 Rp 5.500.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0 Rp 0		0 Rp 0		2 Rp 2.146.000		3 Rp 3.132.000		2 Rp 2.750.000		2 Rp 8.028.000	
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Rp 1.650.000		Rp 1.650.000		Rp 1.517.000		Rp 2.952.000		Rp 1.650.000		Rp 9.419.000	
				Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	2 Rp 1.650.000		2 Rp 1.650.000		0 Rp 0		0 Rp 0		0 Rp 0		0 Rp 3.300.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 1.517.000	2	Rp 2.952.000	2	Rp 1.650.000	2	Rp 6.119.000	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 18.450.000		Rp 18.450.000		Rp 12.000.000		Rp 12.000.000		Rp 18.450.000		Rp 79.350.000	
				Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	4	Rp 4.000.000	4	Rp 4.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 8.000.000	
				Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	2	Rp 1.450.000	2	Rp 1.450.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 2.900.000	
				Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 20.000.000	
				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	5	Rp 3.000.000	5	Rp 3.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 6.000.000	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	15	Rp 12.000.000	15	Rp 12.000.000	15	Rp 18.450.000	15	Rp 42.450.000	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	Rp 7.577.712.000	100	Rp 7.563.622.000	100	Rp 7.054.313.000	100	Rp 6.996.168.000	100	Rp 7.956.581.000	100	Rp 37.148.396.000	Persentase capaian sub keag. penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keag. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keag Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp 7.502.862.000		Rp 7.488.772.000		Rp 6.985.107.000		Rp 6.926.650.000		Rp 7.881.731.000		Rp 36.785.122.000	
				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	Rp 7.502.862.000	12	Rp 7.488.772.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 14.991.634.000	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	60	Rp 6.985.107.000	62	Rp 6.926.650.000	60	Rp 7.881.731.000	60	Rp 21.793.488.000	
		X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp 73.200.000		Rp 73.200.000		Rp 67.800.000		Rp 67.800.000		Rp 73.200.000		Rp 355.200.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	Rp 73.200.000	12	Rp 73.200.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 146.400.000	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 67.800.000	12	Rp 67.800.000	12	Rp 73.200.000	12	Rp 208.800.000	
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp 1.650.000		Rp 1.650.000		Rp 1.406.000		Rp 1.718.000		Rp 1.650.000		Rp 8.074.000	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	1	Rp 1.650.000	1	Rp 1.650.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 3.300.000	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 1.406.000	1	Rp 1.718.000	1	Rp 1.650.000	1	Rp 4.774.000	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	Rp 777.403.000	100	Rp 867.948.000	100	Rp 1.323.058.000	100	Rp 2.141.676.000	100	Rp 850.003.000	100	Rp 5.960.088.000	Persentase capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 3
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	Rp 14.500.000	100	Rp 14.500.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 9.500.000	100	Rp 14.500.000	100	Rp 58.000.000	Persentase capaian sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp 14.500.000		Rp 14.500.000		Rp 5.000.000		Rp 9.500.000		Rp 14.500.000		Rp 58.000.000	
				Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	kali	0	2	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 20.000.000	
				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	buah	0	30	Rp 4.500.000	30	Rp 4.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 9.000.000	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 5.000.000	2	Rp 9.500.000	1	Rp 14.500.000	1	Rp 29.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	Rp 267.450.000	100	Rp 317.450.000	100	Rp 509.003.000	100	Rp 633.441.000	100	Rp 317.450.000	100	Rp 2.044.794.000	Persentase capaian sub keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor + persentase capaian sub keg. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor + persentase capaian sub keg. Penyediaan peralatan rumah tangga + Persentase capaian sub keg. penyediaan bahan logistik kantor + Persentase capaian sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan + Persentase capaian sub keg. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan + Persentase capaian sub keg. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dibagi 7	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 5.500.000		Rp 5.000.000		Rp 2.500.000		Rp 18.000.000		
				Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	Rp 2.500.000	12	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 5.500.000	4	Rp 5.000.000	4	Rp 2.500.000	4	Rp 13.000.000		
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp 37.500.000		Rp 47.500.000		Rp 79.351.000		Rp 196.011.000		Rp 47.500.000		Rp 407.862.000		
				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	Rp 17.500.000	12	Rp 17.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 35.000.000		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	5	5	Rp 20.000.000	5	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 50.000.000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 79.351.000	4	Rp 196.011.000	4	Rp 47.500.000	4	Rp 322.862.000		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 5.000.000		Rp 2.500.000		Rp 15.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	Rp 2.500.000	12	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 2.500.000	4	Rp 5.000.000	1	Rp 2.500.000	1	Rp 10.000.000		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp 54.950.000		Rp 64.950.000		Rp 85.850.000		Rp 85.850.000		Rp 64.950.000		Rp 356.550.000		
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	11	Rp 54.950.000	11	Rp 64.950.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 119.900.000		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 85.850.000	4	Rp 85.850.000	4	Rp 64.950.000	4	Rp 236.650.000		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp 40.000.000		Rp 60.000.000		Rp 61.302.000		Rp 67.000.000		Rp 60.000.000		Rp 288.302.000		
				Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	Rp 40.000.000	12	Rp 60.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 100.000.000		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 61.302.000	13	Rp 67.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 188.302.000		
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 2.580.000		Rp 2.500.000		Rp 12.580.000		
				Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	Rp 2.500.000	12	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 2.500.000	2	Rp 2.580.000	2	Rp 2.500.000	2	Rp 7.580.000		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp 127.500.000		Rp 137.500.000		Rp 272.000.000		Rp 272.000.000		Rp 137.500.000		Rp 946.500.000		
				Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	kali	55	55	Rp 127.500.000	55	Rp 137.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 265.000.000		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	200	Rp 272.000.000	200	Rp 272.000.000	200	Rp 137.500.000	200	Rp 681.500.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	Rp 495.453.000	100	Rp 535.998.000	100	Rp 809.055.000	100	Rp 1.498.735.000	100	Rp 518.053.000	100	Rp 3.857.294.000	Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibagi 3	
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp 2.400.000		Rp 2.400.000		Rp 2.400.000		Rp 2.500.000		Rp 2.400.000		Rp 12.100.000		
				Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	Rp 2.400.000	12	Rp 2.400.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 4.800.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 2.400.000	4	Rp 2.500.000	4	Rp 2.400.000	4	Rp 7.300.000		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 402.640.000		Rp 433.185.000		Rp 319.300.000		Rp 979.300.000		Rp 415.240.000		Rp 2.549.665.000		
				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	Rp 402.640.000	12	Rp 433.185.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 835.825.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 319.300.000	12	Rp 979.300.000	12	Rp 415.240.000	12	Rp 1.713.840.000		
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp 90.413.000		Rp 100.413.000		Rp 487.355.000		Rp 516.935.000		Rp 100.413.000		Rp 1.295.529.000		
				Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	Rp 90.413.000	12	Rp 100.413.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 190.826.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 487.355.000	12	Rp 516.935.000	12	Rp 100.413.000	12	Rp 1.104.703.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	Rp 479.767.000	100	Rp 362.231.000	100	Rp 567.263.000	100	Rp 621.400.000	100	Rp 354.742.000	100	Rp 2.385.403.000	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
																			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 2	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	Rp 479.767.000	100	Rp 362.231.000	100	Rp 567.263.000	100	Rp 621.400.000	100	Rp 354.742.000	100	Rp 2.385.403.000	Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya dibagi 3	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp 429.767.000		Rp 312.231.000		Rp 496.163.000		Rp 465.000.000		Rp 304.742.000		Rp 2.007.903.000		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	36	36	Rp 429.767.000	36	Rp 312.231.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 741.998.000		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	44	Rp 496.163.000	44	Rp 465.000.000	44	Rp 304.742.000	44	Rp 1.265.905.000		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 130.000.000		Rp 30.000.000		Rp 250.000.000		
				Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	2	2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 60.000.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 30.000.000	2	Rp 130.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 190.000.000		
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 41.100.000		Rp 26.400.000		Rp 20.000.000		Rp 127.500.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 40.000.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	76	Rp 41.100.000	50	Rp 26.400.000	76	Rp 20.000.000	76	Rp 87.500.000	
2. Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor				Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	persen	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84		2,48 - 2,83		2,53 - 3,32		4,55		4,55		4,55	(Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1 dikali 100	
	2.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan			Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,18	26,44		26,71		26,97		27,24		27,51		27,51	nilai ekspor pada tahun N	
		03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	73,93	0	Rp 0	75,42	Rp 2.786.000	76,17	Rp 8.660.000	76,93	Rp 6.330.000	77,70	Rp 2.728.000	77,70	Rp 20.504.000	jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota dikali 100%
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	persen	100	100	Rp 0	100	Rp 1.786.000	100	Rp 6.200.000	100	Rp 4.530.000	100	Rp 1.728.000	100	Rp 14.244.000	jumlah izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit tahun N dibagi jumlah rekomendasi izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan tahun N dikali 100%
		3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Rp 0		Rp 1.786.000		Rp 6.200.000		Rp 4.530.000		Rp 1.728.000		Rp 14.244.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin	Perijinan	0	3	Rp 0	3	Rp 1.786.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.786.000		
				Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	8	Rp 6.200.000	6	Rp 4.530.000	8	Rp 1.728.000	8	Rp 12.458.000		
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	persen	100	100	Rp 0	100	Rp 1.000.000	100	Rp 2.460.000	100	Rp 1.800.000	100	Rp 1.000.000	100	Rp 6.260.000	jumlah Tanda Daftar gudang yang terbit tahun N dibagi jumlah rekomendasi Tanda Daftar gudang diterbitkan tahun N dikali 100%	
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Rp 0		Rp 1.000.000		Rp 2.460.000		Rp 1.800.000		Rp 1.000.000		Rp 6.260.000		
				Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Perijinan	0	1	Rp 0	1	Rp 1.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.000.000		
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 2.460.000	1	Rp 1.800.000	1	Rp 1.000.000	1	Rp 5.260.000		
		03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	75,00	75,00	Rp 5.915.365.000	81,25	Rp 8.547.532.000	93,75	Rp 7.607.730.000	100	Rp 8.682.729.000	100	Rp 6.637.915.000	100	Rp 37.391.271.000	jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) pada tahun N dibagi jumlah target sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) akhir periode rpjmd dikali 100%	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	persen	6,25	6,25	Rp 5.793.365.000	6,25	Rp 7.425.532.000	12,5	Rp 7.384.980.000	18,75	Rp 8.633.379.000	18,75	Rp 6.515.915.000	18,75	Rp 35.753.171.000	jumlah pasar rakyat ber SNI dibagi jumlah target pasar rakyat pada akhir periode rpjmd	
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					Rp 1.000.000.000		Rp 2.000.000.000		Rp 587.075.000		Rp 1.500.000.000		Rp 587.075.000		Rp 5.674.150.000		
				Jumlah pasar yang dibangun	pasar	2	0	Rp 1.000.000.000	1	Rp 2.000.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 3.000.000.000		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 587.075.000	1	Rp 1.500.000.000	1	Rp 587.075.000	1	Rp 2.674.150.000		
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Rp 4.793.365.000		Rp 5.425.532.000		Rp 6.797.905.000		Rp 7.133.379.000		Rp 5.928.840.000		Rp 30.079.021.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara	pasar	11	12	Rp 501.657.000	12	Rp 987.022.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.488.679.000	
				Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota pasar	orang	64	64	Rp 1.907.000.000	64	Rp 1.964.210.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 3.871.210.000	
				Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar	orang	84	84	Rp 2.319.708.000	84	Rp 2.389.300.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 4.709.008.000	
				Jumlah petugas kebersihan, kemanan dan pengelola pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	orang	157	157	Rp 60.000.000	157	Rp 80.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 140.000.000	
				Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajamen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar yang dibangun dan dipelihara	unit	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 10.000.000	
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 6.797.905.000	12	Rp 7.133.379.000	12	Rp 5.928.840.000	12	Rp 19.860.124.000	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	Persen	11,49	22,99	Rp 122.000.000	34,48	Rp 1.122.000.000	45,98	Rp 222.750.000	57,47	Rp 49.350.000	68,97	Rp 122.000.000	68,97	Rp 1.638.100.000	jumlah pedagang PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh pk5*100%
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Rp 122.000.000		Rp 1.122.000.000		Rp 222.750.000		Rp 49.350.000		Rp 122.000.000		Rp 1.638.100.000	
				Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	orang	120	120	Rp 62.000.000	120	Rp 62.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 124.000.000	
				Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	120	120	Rp 60.000.000	120	Rp 60.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 120.000.000	
				Jumlah lokasi penataan kawasan foodstreet (SIDa)	lokasi	0	0	Rp 0	1	Rp 1.000.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.000.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 222.750.000	2	Rp 49.350.000	2	Rp 122.000.000	2	Rp 394.100.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	80	84	Rp 146.575.000	88	Rp 492.582.000	100	Rp 138.663.000	100	Rp 102.960.000	100	Rp 135.000.000	100	Rp 1.015.780.000	jumlah komoditas yang diawasi dan dipantau harga dibagi jumlah target komoditas yang diawasi di akhir periode rpjmd*100%	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	persen	27,27	45,45	Rp 141.575.000	54,55	Rp 487.582.000	72,73	Rp 130.148.000	90,91	Rp 96.740.000	100	Rp 130.000.000	100	Rp 986.045.000	jumlah komoditas yang dikendalikan harga dibagi jumlah target komoditas di akhir periode rpjmd*100%	
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Rp 130.000.000		Rp 130.000.000		Rp 130.148.000		Rp 96.740.000		Rp 130.000.000		Rp 616.888.000		
				Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga	komoditas	94	95	Rp 130.000.000	95	Rp 130.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 260.000.000		
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	19	Rp 130.148.000	18	Rp 96.740.000	19	Rp 130.000.000	19	Rp 356.888.000		
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Rp 11.575.000		Rp 357.582.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 369.157.000		
				Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah	lokasi	28	28	Rp 11.575.000	28	Rp 357.582.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 369.157.000		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	persen	100	100	Rp 5.000.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 8.515.000	100	Rp 6.220.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 29.735.000	jumlah realisasi pupuk subsidi yang disalurkan dibagi RDKK*100%	
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					Rp 5.000.000		Rp 5.000.000		Rp 8.515.000		Rp 6.220.000		Rp 5.000.000		Rp 29.735.000		
				Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Ton	0	586	Rp 5.000.000	586	Rp 5.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 10.000.000		
				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 8.515.000	3	Rp 6.220.000	3	Rp 5.000.000	3	Rp 19.735.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%															
		03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,24	7,42	Rp 146.575.000	7,60	Rp 120.337.000	7,79	Rp 251.662.000	7,99	Rp 197.940.000	8,19	Rp 235.698.000	8,19	Rp 952.212.000	volume ekspor tahun N-1 ditambah 2,5%
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir (SIDa)	pelaku usaha	22	23	Rp 146.575.000	24	Rp 120.337.000	25	Rp 125.831.000	26	Rp 98.970.000	27	Rp 117.849.000	27	Rp 609.562.000	jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir tahun N dikurangi tahun N-1
		3.30.05.2.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota					Rp 146.575.000		Rp 120.337.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 266.912.000	
				Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor (SIDa)	UMKM	30	30	Rp 146.575.000	30	Rp 120.337.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 266.912.000	
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor					Rp 0		Rp 0		Rp 125.831.000		Rp 98.970.000		Rp 117.849.000		Rp 342.650.000	
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	0	0	Rp 0	0	Rp 0	30	Rp 125.831.000	30	Rp 98.970.000	30	Rp 117.849.000	30	Rp 342.650.000	
		03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	73,99	75,99	Rp 389.539.000	77,99	Rp 366.766.000	79,99	Rp 315.984.000	81,99	Rp 279.022.000	83,99	Rp 354.637.000	83,99	Rp 1.705.948.000	jumlah UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota dikali 100%
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	persen	73,99	75,99	Rp 389.539.000	77,99	Rp 366.766.000	79,99	Rp 315.984.000	81,99	Rp 279.022.000	83,99	Rp 354.637.000	83,99	Rp 1.705.948.000	jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota dikali 100%
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					Rp 359.539.000		Rp 331.766.000		Rp 281.874.000		Rp 254.112.000		Rp 309.637.000		Rp 1.536.928.000	
				Jumlah UTTP yang ditera ulang	Alat UTTP	4660	4786	Rp 359.539.000	4912	Rp 331.766.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 691.305.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	5038	Rp 281.874.000	5164	Rp 254.112.000	5038	Rp 309.637.000	5038	Rp 845.623.000	
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					Rp 30.000.000		Rp 35.000.000		Rp 34.110.000		Rp 24.910.000		Rp 45.000.000		Rp 169.020.000	
				Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan	UTTP	4660	4786	Rp 30.000.000	4912	Rp 35.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 65.000.000	
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	0	0	Rp 0	0	Rp 0	85	Rp 34.110.000	100	Rp 24.910.000	85	Rp 45.000.000	85	Rp 104.020.000	
		03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	2,09	3,17	Rp 313.828.000	4,26	Rp 480.974.000	5,34	Rp 2.027.946.000	6,42	Rp 1.938.160.000	7,50	Rp 1.938.160.000	7,50	Rp 6.699.068.000	jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran dibagi jumlah usaha mikro yang ada di Kota Pekalongan dikali 100%
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	persen	7,14	6,67	Rp 313.828.000	4	Rp 480.974.000	100	Rp 1.013.973.000	100	Rp 969.080.000	100	Rp 969.080.000	100	Rp 3.746.935.000	jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya tahun N dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1
		3.30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					Rp 25.000.000		Rp 50.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 75.000.000	
				Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi proosi produk melalui E-Marketplace (SiDa)	UMKM	60	60	Rp 25.000.000	60	Rp 50.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 75.000.000	
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 902.033.000		Rp 872.330.000		Rp 872.330.000		Rp 2.646.693.000	
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	0	0	Rp 0	0	Rp 0	160	Rp 902.033.000	150	Rp 872.330.000	160	Rp 872.330.000	160	Rp 2.646.693.000	
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 111.940.000		Rp 96.750.000		Rp 96.750.000		Rp 305.440.000	
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	0	0	Rp 0	0	Rp 0	55	Rp 111.940.000	30	Rp 96.750.000	55	Rp 96.750.000	55	Rp 305.440.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
3. Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi				Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	persen	N/A	3,99		3,84		3,69		3,56		3,44		19,94		(Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1) / Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 * 100
	3.1. Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi			Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	7,52	7,82		8,12		8,42		8,72		9,02		9,02		Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi s.d Tahun N (akumulasi Tahun N-1 ditambah Tahun N)
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	24,59	29,41	Rp 73.288.000	30,94	Rp 112.351.000	31,49	Rp 221.334.000	32,36	Rp 94.360.000	33,23	Rp 0	33,23	Rp 501.333.000	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi *100%
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	persen	0	61,98	Rp 73.288.000	62,81	Rp 112.351.000	63,64	Rp 110.667.000	64,46	Rp 47.180.000	65,29	Rp 0	65,29	Rp 343.486.000	jumlah koperasi sehat cukup sehat dibagi jumlah ksp/usp/kspps/uspps yang ada *100%
		2.17.03.2.01.0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Rp 73.288.000		Rp 112.351.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 185.639.000	
				Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	100	100	Rp 45.288.000	100	Rp 67.351.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 112.639.000	
				Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasab	Koperasi	100	100	Rp 28.000.000	100	Rp 45.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 73.000.000	
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 110.667.000		Rp 47.180.000		Rp 0		Rp 157.847.000	
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	0	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 110.667.000	100	Rp 47.180.000	100	Rp 0	100	Rp 157.847.000	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	38,36	57,84	Rp 565.153.000	58,31	Rp 617.792.000	58,77	Rp 606.707.000	59,22	Rp 14.600.000	59,68	Rp 667.649.000	59,68	Rp 2.471.901.000	jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi yang ada dkali 100%

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR	FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)					
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	0,36	0,57	Rp 565.153.000	0,77	Rp 617.792.000	0,98	Rp 606.707.000	1,18	Rp 14.600.000	1,39	Rp 667.649.000	1,39	Rp 2.471.901.000	jumlah anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah anggota koperasi yang ada dikali 100%	
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Rp 565.153.000		Rp 617.792.000		Rp 606.707.000		Rp 14.600.000		Rp 667.649.000		Rp 2.471.901.000			
				Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	koperasi dan UMKM	116	116	Rp 378.353.000	116	Rp 386.801.600	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 765.154.600		
				Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	koperasi	10	10	Rp 43.800.000	10	Rp 56.497.600	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 100.297.600		
				Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	koperasi	25	25	Rp 37.000.000	25	Rp 51.497.600	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 88.497.600		
				Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	koperasi	25	25	Rp 23.000.000	25	Rp 26.497.600	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 49.497.600		
				Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	koperasi	0	2	Rp 83.000.000	2	Rp 96.497.600	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 179.497.600		
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	0	0	Rp 0	0	Rp 0	225	Rp 606.707.000	30	Rp 14.600.000	225	Rp 667.649.000	225	Rp 1.288.956.000		
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	11,85	11,95	Rp 502.544.000	12,06	Rp 1.123.515.000	12,16	Rp 1.905.996.000	12,27	Rp 647.040.000	12,37	Rp 647.040.000	12,37	Rp 4.826.135.000	jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan *100%	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	persen	1,25	2,45	Rp 502.544.000	3,65	Rp 1.123.515.000	4,85	Rp 952.998.000	6,06	Rp 323.520.000	7,26	Rp 323.520.000	7,26	Rp 3.226.097.000	jumlah usaha mikro yg difasilitasi pendampingan pengembangan usaha dibagi jumlah usaha mikro	
		2.17.08.2.01.0001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,				Rp 502.544.000		Rp 1.123.515.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 1.626.059.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
			SDM, serta Desain dan Teknologi																
				Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)	UMKM	90	90	Rp 280.000.000	90	Rp 730.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.010.000.000	
				Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (SIDa)	UMKM	60	60	Rp 30.000.000	60	Rp 80.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 110.000.000	
				Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	UMKM	20	20	Rp 20.000.000	20	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 50.000.000	
				Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses permodalan	UMKM	20	20	Rp 15.000.000	20	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 45.000.000	
				Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	UMKM	0	20	Rp 20.000.000	20	Rp 55.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 75.000.000	
				Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	UMKM	0	40	Rp 24.544.000	40	Rp 55.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 79.544.000	
				Jumlah usaha mikro yang didata (SIDa)	UMKM	9000	9000	Rp 53.000.000	9000	Rp 143.515.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 196.515.000	
				Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan (SIDa)	event	0	1	Rp 60.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 60.000.000	
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro					Rp 0		Rp 0		Rp 952.998.000		Rp 323.520.000		Rp 323.520.000		Rp 1.600.038.000	
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	0	0	Rp 0	0	Rp 0	209	Rp 952.998.000	47	Rp 323.520.000	209	Rp 323.520.000	209	Rp 1.600.038.000	